



BULETIN PARLEMENTARIA

NOMOR 947/III/II/2017 • FEBRUARI 2017



HUBUNGAN KERJASAMA PARLEMEN INDONESIA - ARAB SAUDI AKAN TERUS BERKEMBANG

14 BURT DPR RI SOSIALISASIKAN
RENSTRA KE PEMPROV DAN
AKADEMISI ACEH

16 DPRD TABALONG
KELUHKAN BANYAKNYA TKA

GRATIS

Hubungan Kerjasama Parlemen Indonesia-Arab Saudi Akan Terus Berkembang



Ketua DPR RI, Setya Novanto mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Ketua Majelis Syuro Arab Saudi, Syeikh Abdullah Bin Muhammad Bin Ibrahim Al-Syeikh sebagai Ketua Majelis Kerajaan Arab Saudi, sekaligus berkeyakinan dibawah kepemimpinannya hubungan dan kerja sama antar Parlemen kedua Negara akan terus berkembang, semakin kokoh dan erat.

“ Merupakan suatu kehormatan dapat menerima kunjungan Ketua Majelis Syuro Arab Saudi. Ini merupakan kunjungan bilateral pertamanya setelah ia terpilih kembali sebagai Ketua Majelis Syuro sejak Desember 2016 lalu. Untuk itu saya ucapkan selama atas terpilihnya kembali yang mulia untuk mengemban tugas dan amanah sebagai Ketua Majelis Kerajaan Arab Saudi. Kami berkeyakinan dan optimis di bawah kepemimpinan Yang Mulia, hubungan dan kerja sama antar parlemen kedua negara akan terus berkembang semakin kokoh dan erat," papar Novanto saat menerima Ketua Majelis Syuro Arab Saudi di ruang tamu pimpinan DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/02).

Kunjungan Ketua Majelis Kerajaan Arab Saudi ke Indonesia ini sekaligus menandai babak baru dalam sejarah hubungan dan kerja sama parlemen kedua Negara yang selama ini telah berlangsung erat di berbagai forum internasional.

Pada kesempatan ini, Politisi Partai Golkar ini juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kebijakan dan kemurahan hati Khadimul Haramain as Syarifain (Pelayan Dua Kota Suci) Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang telah memulihkan Kuota haji Indonesia sebesar 211 ribu Jemaah, serta tambahan 10 ribu Jemaah pada musim haji 2017 ini.

"Bagi kami, Arab Saudi termasuk mitra penting di bidang ekonomi dan perdagangan, meskipun nilai perdagangan kedua negara mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir ini. Ke depan kami berharap nilai perdagangan kedua negara dapat

ditingkatkan," harap Novanto.

Sebagaimana diketahui, total volume perdagangan kedua negara pada 2015 sebesar 5,48 miliar Dolar Amerika, dan pada 2016 (dari bulan Januari sampai Oktober) tercatat sebesar 3,39 miliar Dolar Amerika. Arab Saudi. Diharapkan pasar ekspor halal Indonesia ke Arab Saudi semakin meningkat ke depan.

Ia menyambut baik rencana investasi Arab Saudi di Indonesia sebagai tindak lanjut kesepakatan kerja sama Jeddah September 2015. Oleh karena itu, ia mendorong agar pengusaha Arab Saudi melakukan diversifikasi investasi di Indonesia, seperti di bidang pertanian dan infrastruktur maritim.

Sebaliknya, Novanto juga melihat berbagai program pembangunan yang sedang dilakukan Arab Saudi telah membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk terlibat dalam berbagai

program pembangunan di Arab Saudi.

"Sebagai sesama negara anggota OKI (Organisasi kerjasama Islam), Arab Saudi dan Indonesia juga perlu terus meningkatkan kerjasamanya dalam menangani masalah keamanan internasional, seperti terorisme yang hingga kini masih menjadi ancaman bagi banyak negara di dunia. Masalah Palestina hingga kini juga belum terselesaikan, hal itu perlu mendapat perhatian kita bersama. Kita berharap ada solusi damai yang bisa segera dicapai untuk mengatasi masalah tersebut," pungkasnya.

Kepada Syeikh Abdullah Bin Muhammad Bin Ibrahim Al-Syeikh dan seluruh delegasi Parlemen Arab Saudi, Novanto juga menyatakan kesiapannya dalam menyambut kedatangan raja Arab Saudi Khadimul Haramain as Syarifain (Pelayan Dua Kota Suci), Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud pada awal Maret mendatang. ■

(Awal, Foto: Jaka, Rumi)



Ketua Majelis Syuro Arab Saudi, Syeikh Abdullah Bin Muhammad Al-Syeikh menandatangani daftar hadir



Fadli Zon Sambut Baik Pemindahan Makam Tan Malaka

Makam Pahlawan Nasional Tan Malaka yang kini berada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, rencananya akan dipindahkan ke Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat. Prosesi adat pun sudah disiapkan. Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon menyampaikan apresiasi atas rencana positif tersebut.



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon

Bertempat di ruang kerjanya, Jumat (10/2), Fadli menerima delegasi panitia pemakaman yang diantar Anggota DPR RI Khatibul Umam Wiranu. Ia sekaligus juga sebagai Direktur Eksekutif Tan Malaka Institute. Sebagai orang Minang, Fadli menyambut baik sekaligus akan menghadiri prosesi tersebut pada 21 Februari ini. Pihak panitia sudah mendapat persetujuan dari Kemensos dan Kemenhan. Panitia juga baru melaporkan pertama kali ke DPR RI atas rencana ini.

"Sebagai orang Minang, saya berterima kasih. Ini luar biasa. Tan Malaka sudah terlalu lama tak diangkat sosoknya ke publik," ucap Fadli. Selama 48 tahun makam Tan Malaka tak diketahui. Sampai akhirnya sejarawan Belanda Harry A Poeze menemukannya di TPU Selopanggung, Kediri. Tes DNA atas jasad Tan Malaka sudah dilakukan dan terbukti

Tan Malaka dimakamkan di Kediri. Kini di pusaranya tertulis Ibrahim Datuk Tan Malaka.

Lokasi makam baru untuk Tan Malaka berada di kampung halamannya sendiri, di Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumbar. "Ini *happy ending* dari perjalanan Tan Malaka," ujar Fadli. Di kampung halamannya, Tan Malaka sangat dihormati, karena ia seorang datuk atau raja yang membawahi 124 kaum. Dalam tradisi Minang, seorang datuk biasanya pandai bersilat dan hafal Al Quran.

Menurut Fadli, Tan Malaka juga dikenal sebagai filosof muslim. Peninggalan Tan Malaka cukup banyak, tidak saja buku-buku karyanya, tapi juga benda bersejarah. Sebagian ada di Indonesia dan sebagian lainnya tercecer di berbagai negara yang pernah disinggahinya. ■

(mhl) foto: anef/foa



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH

Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Ptt. Sekjen DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN)

PIMPINAN PELAKSANA

Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),

Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),

Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Mastur Prantono, Suciati, S.Sos

SEKRETARIS REDAKSI

Bagus Mujdiharjanto

ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,

Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar,

Surahmat Eko, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER

Rizka Arinindyia, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Jaka Nugraha,

Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman,

R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI FOTO

Hasri Mentari

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,

e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN & DISTRIBUSI

PIMPINAN PENERBITAN

Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)

WK. PIMPINAN PENERBITAN

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi),

Pesta Evaria Simbolon, S.E, M.Si (Kasubag Distribusi)

STAFF PRODUKSI

Eko Murdiyanto, Subadri, S.E, Barliansyah,

Fathurahman, Mujiono

SIRKULASI

Abdul Kahfi, S.Kom, Remon, Ifan,

Siti Rondiyah, Oji, Lamin, Arif

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

Ketua DPR RI : Anak Indonesia Harus Gemar Membaca Al Quran



Ketua DPR RI, Setya Novanto dan Isteri Deisti A. Novanto bersama pendukung film Iqro

Ketua DPR RI Setya Novanto berpesan agar anak Indonesia gemar membaca Al Qur'an, karena membaca Al Quran merupakan sebuah ibadah yang nilainya tinggi sebagaimana yang telah disampaikan Rasulullah Nabi Muhammad SAW.

“ Al Quran adalah panduan sekaligus pedoman seluruh umat Islam yang sudah sangat lengkap membahas aspek kehidupan. Maka sebagai umat muslim hendaknya berusaha untuk senantiasa membaca serta memahami kandungan setiap ayat demi ayat dalam Al-Quran,” pesannya kepada 1.000 anak yatim piatu saat nonton bareng film "Iqro", di Bioskop XXI Planet Hollywood, Jakarta, Minggu (12/02).

Politisi Partai Golkar ini, mengungkapkan kegembiraannya dapat menyaksikan film ini bersama anak-anak yatim piatu, karena film ini memberikan arti dan motivasi kepada anak agar bisa dan gemar membaca Al Qur'an.

"Saya sangat gembira bisa bersama-sama 1.000 Anak Yatim menonton film Iqro, karena ini adalah merupakan suatu film yang memberikan arti karena membaca ini (Al Qur'an) harus dimulai membaca yang baik," ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini menilai, film ini sangat baik bagi pendidikan, menggambarkan bagaimana membaca Al Qur'an dengan baik. Untuk itu film ini diharapkan dapat disaksikan anak-anak Indonesia hingga daerah-daerah pelosok di negeri ini.

"Film Iqro ini sangat baik untuk pendidikan dan bagaimana membaca Al Qur'an dengan betul dan baik. Tadi saya lihat para anak yatim piatu bisa melihat inilah (Film Iqro) merupakan pembelajaran

pendidikan yang bisa memberikan arti. Khususnya film ini mudah-mudahan bisa terus ditindaklanjuti ke daerah-daerah lain karena sangat berguna untuk kepentingan bangsa dan kepentingan anak-anak didik di Indonesia, Karena Iqro adalah pembelajaran membaca Al Qur'an yang baik dan utama," tegasnya.

Dengan sangat antusias, Setya Novanto menceritakan bahwa karena dengan adanya Al Qur'an, kita bisa melihat bersama ini memberikan arti yang sangat besar, sehingga pendidikan yang sekarang bisa dialami dan bisa memberikan arti yang sangat besar untuk anak-anak yang sedang belajar.

"Harapan saya dengan Film Iqro ini yang sangat berbobot dan memberikan arti ini bisa diteruskan ke daerah-daerah terpencil karena pembelajaran agama dan pendidikan sangat penting yang memberikan arti luar bisa. Karena Iqro adalah pembelajaran membaca Al Qur'an yang baik dan utama," tegasnya. ■

(es. set) Foto: Agung/odi



Pers Berperan Penting Tentukan Kualitas Demokrasi

Hari ini, Kamis (09/02) dunia pers dan seluruh insan jurnalis seluruh Indonesia memperingati puncak Hari Pers Nasional (HPN) yang berpusat di Ambon, Maluku. Pers telah menjadi bagian dari pembangunan dan konsolidasi demokrasi. Bahkan menjadi salah satu pilar demokrasi itu sendiri. Pers memiliki peran penting dalam menentukan kualitas demokrasi kita.

“Tidak terasa, sejak reformasi digemakan kurang lebih dua dasawarsa lalu, pers merupakan salah satu pilar penting kebangkitan kehidupan bangsa dan negara dan khususnya kesadaran akan nilai-nilai demokrasi. Atas dasar itulah kita menjalani kehidupan sebagai anak bangsa hari ini,” kata Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (09/02).

Wakil Ketua Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan itu menambahkan, di tengah suasana politik yang sedang hangat menjelang berbagai perhelatan dan kontestasi, tentu saja seluruh masyarakat Indonesia menginginkan pers sebagai jembatan informasi yang mencerahkan dan mencerdaskan.

"Kita berbangga dengan kebebasan informasi yang kita miliki dengan pers sebagai ujung tombak. Sebagaimana yang terkandung dalam fungsi pers seperti yang termaktub dalam UU sebagai Fungsi Informasi, Pendidikan, Hiburan dan Kontrol Sosial," imbuh Taufik.

Namun saat ini, Tanah Air sedang dilanda berita dan kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau berita *hoax*. *Hoax* seakan telah mewabah dan sulit dihindari. Apalagi, realitas tersebut telah berpotensi memecah-belah dan merusak tatanan sosial dan suasana kerukunan dan keharmonisan kehidupan masyarakat.

"Pers berperan dan berada di garis terdepan dalam meminimalisir berita-berita yang tidak bertanggung jawab serta bohong atau *hoax*," tambah politisi F-PAN itu.

Untuk itu, kebijakan Dewan Pers untuk melakukan verifikasi terhadap media-media di Indonesia mendapat sambutan baik dari Taufik. Ia berharap, dengan adanya verifikasi tersebut kapasitas dan kualitas media, baik cetak, daring, dan juga elektronik lebih baik.

"Terkait verifikasi harus disikapi dalam

kondisi yang tujuannya sepanjang untuk mengatur, untuk menertibkan tentunya kan pasti tidak ada yang tidak setuju," tegas Taufik.

Dia mengakui, hingga saat ini ada ribuan media yang beredar, baik cetak, daring maupun elektronik. Tidak dipungkiri dari ribuan media tersebut ada sebagian kecil yang patut dipertanyakan eksistensinya sebagai media massa.

"Maka, hal yang wajar apabila Dewan Pers melakukan penertiban dalam bentuk verifikasi, agar dapat dibedakan mana yang benar-benar media massa atau pun media komunitas. Justru apabila hal itu dibiarkan, maka tidak akan ada perbedaan antara para insan pers profesional dan oknum yang ingin membela kepentingan tertentu," papar Taufik.

Namun, Taufik menekankan verifikasi tersebut harus transparan dan tidak tebang pilih, serta tak hanya media-media utama saja yang mendapatkannya. Taufik turut menegaskan, dirinya sangat tidak setuju apabila verifikasi itu dijadikan sebagai izin.

"Sepanjang untuk mengatur ketertiban saya pikir itu bukan hal yang kita takuti, justru harus kita dukung. Tapi ketika itu ada unsur-unsur untuk membatasi ruang gerak dari media atau insan pers itu kita tolak mentah-mentah," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Dewan Pers dikabarkan sudah memberikan verifikasi kepada 77 sebelumnya 74 perusahaan pers yang dinyatakan lolos verifikasi. Proses tersebut akan terus dilakukan, karena di Indonesia terdapat ribuan media massa. Verifikasi media massa yang

menjadi bahan perbincangan belakangan ini adalah hasil tindak lanjut dari Piagam Palembang tahun 2010.

Namun jika verifikasi ini dikaitkan sebagai dasar akibat banyaknya berita *hoax*, Taufik menyebutkan sebenarnya *hoax* adalah masalah klasik yang sudah ada zaman Perang Dunia I. Menurutnya, *hoax* harus ditangkal dengan teknologi yang lebih canggih lagi. Karena *hoax* diciptakan untuk mengaburkan informasi-informasi yang benar.

Politisi F-PAN ini yakin, sebagai pilar demokrasi, pers senantiasa memberi pencerahan dan perspektif objektif tentang segala peristiwa dan isu yang menyangkut kehidupan bangsa dan negara. Pers turut serta dalam membangun kehidupan bangsa, mengontrol berbagai penyimpangan yang tidak sejalan dengan pembangunan, dan mengilhami solusi bagi segala persoalan.

"Selamat Hari Pers Nasional. Semoga peran Pers akan semakin memberi kontribusi positif bagi kehidupan bangsa dan negara demi mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik di masa yang akan datang," tutup politisi asal dapil Jawa Tengah itu. ■

laji Inter: Ojo/istock



Wakil Ketua DPR RI bidang Korekku, Taufik Kurniawan

Pimpinan DPR RI Terima Usulan Hak Angket

Pimpinan DPR RI menerima perwakilan empat fraksi yang menggulirkan hak angket terkait Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang aktif kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta, padahal menyandang status terdakwa kasus penodaan agama. Empat fraksi itu adalah Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN. Pengaktifan kembali Basuki sebagai Gubernur DKI dinilai janggal dan melanggar sejumlah aturan.

Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon yang didampingi Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang, Agus Hermanto dan Wakil Ketua DPR RI Korkesra, Fahri Hamzah, mengatakan pihaknya menerima usulan hak angket yang telah ditandatangani setidaknya oleh 90 Anggota Dewan lintas fraksi. Menurutnya, hal itu sudah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai penggunaan hak angket.

"Dari usul inisiatif ini, sudah mencukupi syarat. Syaratnya adalah minimal 25 Anggota dan lebih dari 1 fraksi. Saat ini sudah ada 90 Anggota dan 4 fraksi Kami atas nama Pimpinan, akan meneruskan pada mekanisme yang berlaku," kata Fadli, usai menerima usulan hak angket di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/02).

Politisi F-Gerindra itu menambahkan, usulan ini terlebih dahulu akan disampaikan di Rapat Pimpinan, untuk dibahas di Badan Musyawarah (Bamus), dan kemudian diagendakan pada Rapat Paripurna.

"Jika Paripurna telah menggulirkan ini, maka nanti akan menjadi Pansus yang bisa menyelidiki tentang dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Pemerintahan Daerah, UU KUHP, maupun UU lain, bahkan konstitusi," tegas Fadli.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu pun berharap Anggota Dewan lain untuk berpartisipasi dalam angket itu. "Mudah-mudahan akan lebih banyak Anggota maupun dari fraksi lain untuk ikut menandatangani inisiatif untuk hak angket tentang pengaktifan lagi Ahok sebagai Gubernur dengan status terdakwa," tutup Fadli.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (F-PKS) pun memastikan syarat penggunaan hak angket ini sudah dipenuhi. "Kalau mau



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Agus Hermanto, dan Fahri Hamzah beserta sejumlah Anggota pengusul hak angket

dilihat hasilnya, nanti di Paripurna, ketika sudah dibacakan, akan didukung atau tidak oleh seluruh Anggota Dewan," imbuh politisi asal dapil NTB itu.

Sementara Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang Agus Hermanto (F-PD) juga memastikan, Bamus akan segera mengagendakan pembahasan untuk usulan ini. "Kemudian diproses, diagendakan Paripurna, dan dibacakan di hadapan Anggota Dewan," ujar politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sebelumnya, Anggota Komisi II Fandi Utomo mewakili Fraksi Partai Demokrat melaporkan, usulan ini sudah ditandatangani oleh Fraksi Gerindra sebanyak 22 Anggota, Fraksi Partai Demokrat sebanyak 42 Anggota, Fraksi PAN 10 Anggota dan Fraksi PKS sebanyak 16 Anggota. Tanda tangan mulai dikumpulkan sejak pagi hari. "Atas nama empat fraksi ini, mohon kiranya pimpinan bisa meneruskan ke tahapan selanjutnya," kata politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Berikutnya, perwakilan F-PKS, Anggota

Komisi II Al Muzzamil Yusuf mengatakan bahwa hak angket sebagai salah satu dari fungsi DPR RI, yaitu fungsi pengawasan. Karena ada dugaan kuat pelanggaran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan UU No 10 Tahun 2016.

"Selain itu dalam Sumpah Presiden di pasal 9 disebutkan akan sepenuhnya menjalankan UUD 1945. Dalam konteks itu, konstitusi ada hak angket dalam pelanggaran undang-undang. Ini bagian semangat demokrasi kita," tegas politisi asal dapil Lampung itu.

Kemudian, mewakili F-PAN, Anggota Komisi II Yandri Susanto menegaskan, banyak kejanggalan yang terjadi pada pengangkatan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI. Salah satunya adalah pemilihan hari serah terima jabatan yang masih di masa kampanye.

"Banyak yang janggal pada serah terima jabatan Ahok. Pertama, kenapa dilakukan di hari Sabtu di masa kampanye. Kedua, kenapa kepala daerah lain diberhentikan secara langsung, kenapa



Ahok 'dianak emaskan'. Kami sebagai anggota DPR RI yang concern untuk mengusulkan hak angket, ini semua akan kita kawal. Yang tidak tanda tangan bukan berarti tidak mendukung," jelas politisi asal dapil Banten itu.

Dan yang terakhir, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mewakili Fraksi Gerindra mengatakan bahwa dengan mengajukan hak angket ini, pihaknya ingin memberikan kesamaan hukum bagi semua warga negara. Selain itu, dengan adanya hak angket bisa menunjukkan adanya

keberpihakan dari pemerintah terhadap salah satu calon dalam Pilkada.

"Ini tugas kita dalam amanat konstitusi. Serah terima jabatan bila itu melanggar bisa didiskualifikasi calon tersebut (dari Pilkada). KPU, Bawaslu dan DKPP harus bertindak cepat. Yang paling penting, pemerintah bisa menunjukkan keadilan dan tidak berpihak," tegas politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Usulan hak angket digulirkan menyikapi kontroversi keputusan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri yang tidak

menerbitkan pemberhentian sementara Basuki. Kemendagri beralasan menunggu nomor registrasi dari pengadilan serta cuti kampanye Basuki selesai.

Serah terima jabatan dengan pelaksana tugas Gubernur DKI Sumarsono dilakukan Sabtu (11/02) lalu. Basuki pun kembali ke Balai Kota sebagai Gubernur DKI. Sikap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang belum memberhentikan sementara Ahok dianggap bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan mencederai Indonesia sebagai negara hukum. ■

ist/ah, foto: majalah

Fraksi PDI Perjuangan Tolak Hak Angket

Fraksi PDI-Perjuangan menolak usulan hak angket terkait status Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang telah aktif kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pasalnya menurut Anggota Komisi VI DPR RI Eriko Sotarduga, hal tersebut hanya akan menjatuhkan citra DPR karena masalah ini tidak strategis jika menyangkut fungsi pengawasan DPR.

“ Hal seperti ini juga pernah terjadi, tapi dalam kasus Ahok masih dalam tahap proses. Kita jangan mendahului,” ujar Eriko yang juga Anggota Badan Anggaran DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/02).

Lebih lanjut politisi F-PDI Perjuangan itu mengatakan pihaknya akan melakukan musyawarah dengan anggota DPR RI lainnya terkait masalah ini. "Kami punya keyakinan bahwa semua teman-teman di DPR RI ini punya hubungan saling keterkaitan dengan baik, sangat dekat antar fraksi. Tapi mungkin saat ini sedang ada arahan dari masing-masing partai," lanjutnya.

Eriko menghimbau agar masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan, karena sudah masuk masa tenang pilkada. "Kenapa hal ini harus dibesar-besarkan, padahal kita sudah ada putusan, terima saja, jangan malah berusaha menjatuhkan calon, biarkan masyarakat yang menilai," ujarnya.

Legislator dari Dapil DKI Jakarta II itu juga mengingatkan bahwa bukan DKI saja yang melakukan pilkada, ada 101 pilkada serentak di Indonesia. "Kenapa harus dibesar-

besarkan," kata Eriko seolah bertanya.

Seharusnya di minggu tenang pilkada ini, lanjut Eriko, para calon merefleksikan diri seperti apa sebenarnya mengenai kepemimpinan. Karena dalam pemilihan calon Gubernur DKI kemungkinan akan dilakukan dua putaran.

"Biarkan pemerintah yang menilai itu. Ini hanya soal komunikasi kita yang harus

berjalan dengan baik, secara hangat dan terbuka. Masalah ini jangan terlalu dibesar-besarkan, masih batas wajar. Karena kita semua dapat hak tersebut, mau menyetujui atau tidak. Dan kita tidak menanggapi masalah ini sebagai sesuatu hal yang sangat serius, kita akan lakukan pendekatan. Kalaupun tidak, nanti akan diputuskan di Rapat Paripurna," pungkasnya. ■

gawmp/keanu/ok



Anggota Fraksi PDI-Perjuangan, Eriko Sotarduga

"Kami punya keyakinan bahwa semua teman-teman di DPR ini punya hubungan saling keterkaitan dengan baik, sangat dekat antar fraksi. Tapi mungkin saat ini sedang ada arahan dari masing-masing partai"

Pers Berperan Penting Bagi Demokrasi di Indonesia

DPR sebagai lembaga legislatif memiliki hubungan yang erat dengan pers yang merupakan pilar ke empat dari demokrasi di Indonesia, tanpa adanya pers akan sulit untuk melakukan sebuah demokrasi. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon saat berkunjung ke kantor redaksi Tribun News di kawasan Palmerah, Jakarta.

“Kunjungan saya sebagai bentuk apresiasi terhadap pers, apalagi baru saja kita merayakan Hari Pers nasional. Tribun News dan Tribun Grup adalah salah satu media yang mempunyai jaringan yang terluas di Indonesia, dan ikut berperan besar dalam proses demokrasi di Indonesia. Kita tidak bisa berdemokrasi tanpa adanya pers,” ucap Fadli usai berdialog dengan insan pers di kantor Redaksi Tribun News, Jakarta, Senin (13/02).

Fadli berharap agar media tetap menjadi bagian yang penting dalam menyampaikan informasi kepada publik secara obyektif dan tetap mengedepankan unsur yang menjadi kepentingan nasional.

"Pers sebaiknya tidak terlalu dekat dengan kekuasaan, namun juga tidak harus anti terhadap kekuasaan, Karena kalau pers



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon menerima lukisan

terlalu dekat dengan kekuasaan maka tidak ada lagi yang bisa mengkritik. Peran pers begitu besar dan vital bagi demokrasi, karena pers berperan sebagai pilar ke empat dari demokrasi kita. Kalau pers itu diam maka seolah-olah suara rakyat dan demokrasi juga

diam. Kita juga tidak ingin ada lagi berita-berita palsu yang terus beredar," tegasnya.

Ia juga mengatakan, DPR RI sebagai lembaga legislatif merupakan *vice speaker* atau corong dari suara dan aspirasi rakyat, sesuai tugasnya yang terkait dengan tupoksi DPR RI yaitu legislasi, pengawasan, anggaran, dan dua fungsi tambahan yakni fungsi diplomasi parlemen dan fungsi representasi sebagai pembawa aspirasi dari masyarakat di dapil masing-masing dan juga di seluruh Indonesia.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Tribun News atas kontribusinya yang sangat besar bagi demokrasi kita, dan hingga saat ini Tribun News masih termasuk yang obyektif dalam menyampaikan berita-berita yang berkembang di masyarakat," pungkasnya. ■

(dipampi) Foto : Aneka/Pr

Fahri Hamzah Usulkan Interpelasi Dulu Sebelum Hak Angket

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah menyarankan kepada Anggota Dewan untuk tak langsung menggunakan hak angket untuk menyelidiki persoalan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang tak kunjung dinonaktifkan meski sudah menjadi terdakwa dalam kasus penodaan agama. Menurutnya, Anggota DPR sebaiknya menggunakan hak bertanya atau interpelasi terlebih dahulu.



Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra, Fahri Hamzah



"Untuk kasus Ahok itu, saya lebih cenderung interpelasi. Diinterpelasi saja dulu biar presiden datang ke DPR menjelaskan. Karena penjelasan Kemendagri itu sebetulnya penjelasan Presiden. Tapi perlu jawaban resmi dari Presiden yang dibaca di Paripurna, interpelasi namanya," kata Fahri dalam konferensi pers kepada awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/02).

Politisi F-PKS itu mendorong penggunaan hak bertanya karena ada unsur interpretasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas

Undang-undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) untuk mempertahankan Ahok.

"Semua interpretasi Kemendagri ini di luar dari normal cara menginterpretasi hukum, di luar kelaziman membaca teks-teks hukum. Karena itu usul saya ditanya atau diinterpelasi saja dulu, biar Presiden datang ke DPR menjelaskan di paripurna," imbuh Fahri.

Namun, tambah Fahri, bila penjelasan Presiden baik langsung atau tertulis di depan forum paripurna dianggap tidak cukup, DPR kemudian bisa menggunakan hak angket atau penyelidikan. Sebab, Fahri melihat

banyak keanehan dari sikap Pemerintah yang mengistimewakan Basuki.

"Saya terus terang melihat agak aneh pengistimewaan yang diberikan Presiden dan Pemerintah mulai dari KPK, Kepolisian. Sekarang sikap Kemendagri kepada saudara Basuki itu agak berlebihan," tandas Fahri.

Di sisi lain, politisi asal dapil Nusa Tenggara Barat itu tidak dapat menghalangi jika fraksi-fraksi bertekad bulat menggunakan hak angket. ■

(es) / fotomuka / kw.

Pers Harus Terus Terlibat dalam Proses Demokrasi di Indonesia



Ketua DPR RI, Setya Novanto

Ketua DPR Setya Novanto menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh insan pers di seluruh Indonesia. Baginya pers adalah 'urat nadi' pembangunan yang telah terlibat dan ikut berkontribusi besar bagi pembangunan nasional.

Ketua DPR RI Setya Novanto berharap seluruh rangkaian agenda HPN yang diperingati setahun sekali ini bisa berjalan dengan baik, tentunya dengan sinergi antara panitia penyelenggara dengan Pemerintah Daerah Maluku. "Saya berharap seluruh agenda peringatan Hari Pers Nasional tahun ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana," katanya.

Pimpinan Dewan yang juga Ketua Umum Golkar ini mengatakan, sebagai negara demokrasi, Indonesia beruntung telah memiliki UU Pers yang mengatur dan menjamin perlindungan bagi segenap insan pers. Kendati demikian, pers juga memiliki kode etik jurnalistik yang mengikat dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan fungsi jurnalistiknya.

"Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada Pasal 8 dijelaskan, pers mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya. Meskipun memiliki hak khusus dan dilindungi UU, pers juga tidak boleh berlebihan atau melampaui fungsinya sesuai dengan kode etik yang mengikatnya," kata

Novanto. "Salah satunya, pers tidak punya hak untuk memeriksa, seperti hak memeriksa atau menyidik yang dimiliki aparat penegak hukum," tambahnya.

Dalam perjalanannya, lanjut Novanto, pers Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menentukan nasib bangsa. Tidak ada sejarah atau peristiwa penting yang tidak tercatat dan tertulis. Pergolakan politik, pertumbuhan ekonomi, peristiwa hukum serta situasi keamanan tak lepas dari peran media. Kini, di era teknologi yang pesat, dunia pers dituntut untuk mampu bersaing serta tetap profesional.

"Era teknologi yang sangat pesat ini ikut mempengaruhi perkembangan media. Oleh karena itu pada momen perayaan Hari Pers Nasional saya juga berharap, pers sebagai industri dapat terus berbenah diri agar bisa bersaing, menjadi lebih profesional serta mampu secara obyektif menyampaikan informasi, pendidikan dan pencerahan bagi masyarakat," pungkash Setya Novanto. ■

(fma) Foto: Anindia / kw.

“ Sebagai salah satu pilar demokrasi, pers memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Pers adalah urat nadi pembangunan bangsa ini. Untuk itu pers harus terus terlibat dalam proses demokrasi di Indonesia serta penyelenggaraan pembangunan nasional demi terciptanya kesejahteraan rakyat. Selamat Hari Pers Nasional 2017,” ucap Setya Novanto menyambut Hari Pers Kamis (09/02).

Puncak Hari Pers Nasional 9 Februari 2017 diselenggarakan di Kota Ambon, Maluku. Serangkaian agenda kegiatan telah disiapkan dan terlaksana dengan baik. Diperkirakan hadir lebih kurang 2.000 peserta HPN 2017 dari seluruh Indonesia.

Kemenkumham Diminta Perbaiki dan Tertibkan Aturan di Lapas

Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo berharap Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk segera memperbaiki sekaligus menertibkan aturan di Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut diungkapkannya menyusul kabar adanya warga binaan (Napi-red) Lapas Sukamiskin, Bandung yang bebas berpergian.

“ Kalau informasi pelepasan napi Lapas Sukamiskin itu benar, sudah barang tentu hal tersebut merupakan pelanggaran. Kasus ini harus menjadi perhatian Dirjen Lapas. Namun sebenarnya permainan *hanky panky* di dalam Lapas, bukan rahasia umum lagi. Semua lapas juga ada praktik seperti itu. Makanya kami mendorong Menkum HAM agar bertindak tegas menegakkan aturan dalam hal pembinaan warga binaan itu,” papar Bamsoet, begitu wartawan biasa menyapanya, sesaat sebelum memasuki ruang pimpinan Komisi III, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Ia melanjutkan, tidak boleh ada pemberian keistimewaan. Semua narapidana harus dapat perlakuan yang sama. Karena praktik *hanky panky* yang masih terjadi itulah yang membuka ruang dan peluang terjadi di Lapas.

“Peluang pelanggaran itu suatu

keistimewaan bagi narapidana, termasuk adanya kelonggaran-kelonggaran. Misalnya maraknya peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam Lapas juga menjadi bagian dari keistimewaan para napi tersebut,”ujarnya.

Kalau tidak ada main mata, tambah Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, tidak mungkin bisa keluar dari Lapas. Hal itu termasuk dalam pemberian keistimewaan. Oleh karena itu ia menegaskan, solusinya hanya satu, terapkan aturan yang tegas.

Terkait pendapat yang mengatakan masih minimnya insentif bagi petugas Lapas, Bamsoet menegaskan hal tersebut bukan sebuah alasan untuk melakukan tindakan pelanggaran. Pasalnya, tidak hanya petugas Lapas yang masih merasa kurang dalam insentif, Polisi, Guru dan aparat lainnya pun akan merasa kurang.

“Kalau kasus itu tidak bisa diperbaiki, Kemenkum HAM harus memberhentikan

Kepala Lapas, atau mengundurkan diri saja. Untuk itu harus ada waktu yang tegas bagi Kalapas, dalam waktu satu minggu ini untuk memperbaiki dan menegakkan aturan. Kalau tidak, lebih baik diganti,” tegasnya. ■



Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo

Foto: Aenitoc

Presiden Diharapkan Segera Respon Rekomendasi Majelis Kehormatan MK

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil berharap Presiden segera merespon surat rekomendasi yang diberikan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait pengganti Patrialis Akbar. Hal tersebut diungkapkannya kepada wartawan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (09/02).

“ Secara prosedural sudah dilakukan MK dengan mengirimkan surat rekomendasi pemberhentian Patrialis Akbar dan meminta segera ditentukan penggantinya. Karena secara etika dia sudah melanggar. Terkait rekomendasi tersebut, saya berharap Presiden harus *responsive*, segera merespon surat rekomendasi tersebut,” ujar Nasir Djamil.

Meski demikian Nasir menyadari bahwa tidak mudah bagi Presiden untuk menentukan Hakim Konstitusi pengganti Patrialis Akbar. Mengingat ada beberapa langkah yang harus dilalui Presiden untuk itu. Misalnya menentukan nama-nama calon, menyeleksi sehingga ditentukan satu nama.

Politisi dari Fraksi PKS ini berharap

dengan komposisi jumlah hakim konstitusi yang ada saat ini, yakni delapan orang mampu bertindak seolah-olah berjumlah sembilan orang. Terlebih lagi dalam hitungan hari akan segera berlangsung Pilkada seserentak yang memungkinkan akan terjadi sengketa pilkada setelah itu. ■



Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil

Foto: Aenitoc



Komisi V DPR RI Terima Aspirasi DPRD dan Masyarakat Bandung Barat Korban Proyek KA Cepat

Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan DPRD Kabupaten Bandung Barat yang hadir bersama dengan masyarakatnya, guna mendengarkan keluhan dan aspirasi yang disampaikan terkait dengan masalah ganti rugi bangunan akibat terkena proyek pembangunan kereta api cepat.

Masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang menjadi korban proyek kereta api cepat itu merasa khawatir, karena ada isu yang berkembang bahwa bangunan rumah mereka akan segera dirubuhkan. Hal itu disebabkan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) merasa sebagai pemilik atas lahan tempat berdirinya bangunan masyarakat tersebut.

"Kami akan menyampaikan hasil pikiran, pandangan, dan aspirasi dari masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang hadir dalam rapat internal Komisi V DPR RI ini. Saya akan menyampaikannya kepada seluruh anggota Komisi V DPR RI, selanjutnya akan kami sampaikan kepada Pimpinan DPR RI, untuk dapat mengetahui langkah atau tindak lanjut apa yang akan dilakukan berdasarkan hasil internal itu," ucap Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (09/02).

Fary mengatakan, ada berbagai opsi langkah yang mungkin bisa dilakukan, misalnya dengan memanggil mitra kerja Komisi V DPR RI yakni Kementerian Perhubungan, atau berkunjung langsung bersama mitra kerja untuk melihat situasi dan kondisi di lapangan.

"Bisa juga kita melakukan rapat gabungan dengan Komisi VI DPR yang membidangi tentang BUMN, karena hal ini berkaitan dengan administrasi dan manajemen keuangan PT. Kereta Api Indonesia. Kami akan secepatnya memberikan informasi mengenai keputusan terkait langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya kepada Pimpinan DPRD

kabupaten Bandung Barat," ujarnya.

"Dengan kedatangan bapak ibu semua di Gedung DPR RI ini, maka sudah menjadi bagian dari perjuangan kita bersama. Oleh karenanya kita meminta beberapa catatan yang berkaitan dengan pendataan dari keluarga yang menjadi korban proyek tersebut, untuk dijadikan referensi oleh Komisi V DPR RI dalam melakukan pengawasan dan memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan oleh DPRD dan masyarakat Bandung Barat," pungkasnya. ■

(sep.mpi) Foto: Jaganadi/ot

"Kami akan menyampaikan hasil pikiran, pandangan, dan aspirasi dari masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang hadir dalam rapat internal Komisi V DPR RI ini. Saya akan menyampaikannya kepada seluruh anggota Komisi V DPR RI, selanjutnya akan kami sampaikan kepada Pimpinan DPR RI, untuk dapat mengetahui langkah atau tindak lanjut apa yang akan dilakukan berdasarkan hasil internal itu"



Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis menerima berkas pengaduan dari DPRD, Bandung Barat

Perusahaan yang Berangkatkan TKI Non Prosedural Harus Ditindak Tegas

Pemerintah harus menindak tegas pihak-pihak yang memberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara non prosedural, sebagai bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada TKI.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendy saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid.

"Termasuk Penempatan Pekerja Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) juga harus ditindak tegas jika mereka memberangkatkan TKI secara non prosedural," tegas Dede di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Senayan, Kamis (09/02).

Lebih lanjut, politisi partai Demokrat itu mengatakan guna mencegah adanya TKI *non procedural*, BNP2TKI perlu bekerja sama dengan Perwakilan RI di seluruh negara penempatan TKI.

"Pemerintah juga harus memonitor perpanjangan kontrak kerja TKI yang dilakukan oleh agensi di luar negeri serta meningkatkan sosialisasi pencegahan TKI non prosedural di dalam negeri," ujarnya

Terkait kebijakan pemutihan yang diprogramkan Pemerintah Malaysia dan negara-negara lain, Komisi IX menekankan BNP2TKI harus berperan aktif dalam menindaklanjutinya.

Sedangkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) BNP2TKI harus melakukan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Mantan Wakil Gubernur Jabar itu menegaskan, Komisi IX mendesak Kepala BNP2TKI untuk melakukan inisiasi

penyelesaian permasalahan tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK), Nelayan dan Pelaut yang berkoordinasi dengan Kementerian dan lembaga terkait. ■



Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf

Komisi VIII DPR RI Kunjungi Jatim, Gali Data Sertifikasi Guru dan *Inpassing*

Tim Kunjungan Kerja Panja Sertifikasi Guru dan *inpassing* Komisi VIII DPR RI mengunjungi Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Timur, Kamis lalu (09/02) di Surabaya untuk menyamakan data mengenai sertifikasi guru dan *inpassing*.



Pertemuan Tim Panja Komisi VIII dengan kakanwil Kemeneag Jatim di Surabaya



"Kami datang ke sini untuk meminta penjelasan Kanwil Kemenag Jatim tentu saja berdasarkan data dari kabupaten/kota, apakah data di Jatim ini sama dengan data yang disampaikan pemerintah (Kemenag) kepada Komisi VIII," jelas Ketua Tim Kunjungan Abdul Malik Haramain saat pertemuan dengan Kepala Kanwil Kemenag Jatim dan para Kepala Kantor Agama Kabupaten/Kota se Jatim, di Surabaya.

Menurut Wakil Ketua Komisi VIII ini, data yang diterima Komisi VIII dari Dirjen PHU Kemenag dan Irjen Kemenag bahwa SK Inpassing ada sekitar 121 ribu.

Dari 121 ribu tersebut, lanjut Abdul Malik Haramain, yang sudah lulus verifikasi 82.090.

Dan yang belum diverifikasi ada 39.386.

"Alhamdulillah yang sudah lulus verifikasi 82.090 itu, tahun 2015 sudah terbayar, dan 2017 anggarannya sudah ada. Hanya untuk tahun 2016 belum terbayar," terangnya.

Politisi PKB ini, menerangkan bahwa Komisi VIII telah meminta Kemenag untuk menyelesaikan masalah pembayaran ini. "Bagaimana caranya agar 82.090 bisa diselesaikan. Baik yang terutang di 2016 maupun di 2017. Dan sisanya 38.386 itu, kita minta kepada Kemenag untuk diverifikasi di 2017 ini," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, anggota dewan dari daerah pemilihan Jawa Timur II ini menjelaskan tujuan Komisi VIII membentuk

panja sertifikasi guru dan inpassing adalah karena sering muncul masalah di sertifikasi guru dan inpassing dan masalah ini selalu menjadi isu aktual .

Kenapa masalah sertifikasi dan inpassing selalu menjadi isu hangat? Ia berpendapat karena memang ada persoalan, baik persoalan seputar pendataan, perekrutan dan yang terpenting persoalan seputar pembayaran yang mengakibatkan negara berutang kepada guru.

"Itu naif. Kok ada negara sebesar Indonesia berutang kepada guru. Oleh karena itu Komisi VIII coba menyelesaikan dan membicarakan sebetulnya problemnya dimana," tukasnya. ■

(es) Foto: Saichid

BURT DPR RI Sosialisasikan Renstra ke Pemprov dan Akademisi Aceh

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI berkunjung ke Provinsi Aceh, Rabu (08/02), dipimpin Wakil Ketua BURT Elva Hartati dan Agung Budi Santoso dalam rangka sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) DPR RI Tahun 2015-2019.

Elva Hartati dalam sambutannya menyampaikan, DPR RI berkewajiban menyosialisasikan Rencana strategis (Renstra) DPR RI. Untuk itu, Ia berharap mendapat masukan dari Pemerintah Aceh, akademisi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.

"Rencana strategis ini merupakan perencanaan jangka menengah DPR RI dalam menjalankan amanat tugas-tugas konstitusi. Ini juga menjadi acuan bagi DPR RI dalam merumuskan program kerja tahunan DPR RI," kata Elva.

Sosialisasi tersebut sambung dia, dilakukan sekaligus untuk menyerap aspirasi dari semua pihak dan menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana strategis periode lima tahun berikutnya.

Tim kunjungan kerja spesifik bersama 13 anggota BURT ini disambut oleh Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Aceh, dan menghadirkan narasumber Wakil Rektor bidang Perencanaan Kerja Sama

dan Humas Universitas Syah Kuala Aceh, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh, serta Tokoh Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya.

Lebih lanjut Elva Hartati mengatakan masukan-masukan dari berbagai pemangku

kepentingan di Aceh ini akan disinergikan dalam rapat BURT agar supaya tercapai kesinambungan, tidak putus antara DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, sampai ke DPR RI. ■

(enong) Foto: Kresna/hr



Elva Hartati memimpin Sosialisasi Renstra dalam Kunjungan Kerja Spesifik BURT DPR RI ke Provinsi Aceh

"Rencana strategis ini merupakan perencanaan jangka menengah DPR RI dalam menjalankan amanat tugas-tugas konstitusi. Ini juga menjadi acuan bagi DPR RI dalam merumuskan program kerja tahunan DPR RI"

Bersama-sama Melawan *Hoax*

Hoax belakangan menjadi kata yang populer, ini merupakan fenomena yang menyerang hampir semua lini masyarakat global melalui media-media yang mempunyai akses untuk menyajikan informasi lewat internet. Menanggapi gejala tersebut Badan Keahlian Dewan (BKD) menyelenggarakan seminar dengan tajuk 'Melawan *Hoax*' di ruang Persipar, Nusantara II, Kamis (09/02).

BKD mengundang pembicara dari praktisi media sosial Fahmi Ismail, dia memaparkan, *hoax* yang sehari-hari memecah belah bangsa itu ada. Contohnya banyak informasi dan juga gambar-gambar dengan keterangan yang menyesatkan. Info tersebut bermaksud memecah belah kerukunan antarumat dan suku bangsa. "Kita sama-sama punya masalah dengan *hoax*," ungkap Fahmi.

Dalam diskusi yang juga mengundang pembicara dari pihak Kementerian Informasi dan Komunikasi tersebut juga membicarakan bahwa *hoax* muncul dengan adanya sentimentil atas golongan atau pihak, terkait tindakan atau kebijakannya yang tidak sesuai dengan alur berpikir pihak oposisinya.

Hoax atau berita palsu mengikuti alur berpikir pembacanya yang kira-kira bisa menimbulkan efek sensitivitas yang meningkat entah itu kebencian atau semangat untuk mendukung dengan sajian berita tersebut, lalu berujung pada budaya berbagi melalui media sosial agar lebih banyak orang yang membaca.

Hoax dengan ujaran kebencian sangat berbahaya jika itu menyangkut kepentingan masyarakat banyak, berita *hoax* bisa menjadi pemicu atas tindakan-tindakan anarki pada orang yang mempercayai berita tersebut sebagai kondisi yang harus dicegah. Salah satunya berita tentang keburukan pemimpin suatu negara/daerah yang disajikan media bisa memicu kebencian juga bagi masyarakatnya.



Suasana seminar BKD DPR RI yang bertajuk "Melawan Hoax" menghadirkan pembicara dari Kemenkominfo dan Praktisi Media Sosial

Fahmi juga mengungkapkan, informasi yang beredar bebas dari dunia internasional, tentang konflik di Timur Tengah, masuk Indonesia, bisa menyulut pertikaian. Masyarakat yang mudah terpengaruh, akhirnya masuk juga dalam pusaran konflik. "Konflik itu datang dari informasi semacam ini. Ada informasi *hoax*, ada rumor," tandasnya.

Di sisi lain moderator dari BKD Rohani Budi Prihatin menjelaskan, bahwa seluruh masyarakat punya masalah dengan *hoax*, sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan partisipasi publik jika ditemukan konten-konten yang menyulut pertikaian. ■

"Konflik itu datang dari informasi semacam ini.
Ada informasi *hoax*,
ada rumor"



DPRD Tabalong Keluhkan Banyaknya TKA

Anggota DPRD Kabupaten Tabalong Sumiati (F-PKS) mengeluhkan banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) *skilled* maupun kasar yang masuk ke Tabalong. Untuk itu, pihaknya ingin membuat Peraturan Daerah mengenai Ketenagakerjaan guna melindungi pekerja lokal.

“Kami ingin merevisi Perda ketenagakerjaan yang diharapkan bisa melindungi tenaga kerja lokal Kabupaten Tabalong,” ungkap Sumiati bersama beberapa anggota DPRD Tabalong berkonsultasi terkait mekanisme pelaksanaan tugas dan kewenangan Badan Pembentukan Perda di Ruang Badan Keahlian DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (09/02).

Ia mengungkapkan, saat ini banyak pekerja kasar yang datang bekerja dan menetap, jumlah terbesar TKA berada di Kabupaten Tabalong sementara, jumlah TKA ilegal tidak bisa diprediksi karena wilayah Tabalong sebagian besar adalah hutan sehingga sulit untuk ditemukan. "Jumlahnya ada 132 orang TKA, khususnya yang dari China. Itu yang resmi, namun rumor yang beredar di masyarakat itu bahkan lebih," ungkapnya.

Di sisi lain, lanjutnya, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum

mengakomodir perlindungan terhadap tenaga kerja daerah lokal. Padahal, Tabalong merupakan daerah tujuan industri yang memerlukan tenaga kerja yang banyak.

Namun, faktanya tenaga kerja di Tabalong masih didominasi oleh tenaga kerja asal Jawa maupun asing. Sehingga hal tersebut menimbulkan kecemburuan sosial dari masyarakat setempat.

"Amanat UU ini sangat merugikan kami yang di daerah. Kami berkeinginan nantinya formulasi yang bisa kami adopsi dalam perda inisiatif ini mampu melindungi tenaga kerja lokal daerah. Yang nantinya kita sisipkan melalui kearifan lokal," pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Penelitian (Puslit) Setjen DPR RI Indra Pahlevi mengatakan inisiatif pembuatan peraturan daerah boleh dilakukan oleh siapapun, baik dari fraksi, komisi, maupun perseorangan.

Sementara perihal tenaga kerja asing, diakuinya, hal serupa sudah menjadi temuan oleh Komisi IX DPR RI selama

melakukan kunjungan ke beberapa daerah di seluruh Indonesia. Beberapa Komisi terkait seperti Komisi I DPR RI, Komisi III DPR RI, Komisi IX DPR RI, Komisi X DPR RI dan Komisi XI DPR RI akan melakukan Rapat Gabungan dengan Kementerian terkait setelah Pilkada Serentak.

Lebih lanjut, ia mengatakan maraknya TKA merupakan imbas dari *Turnkey Project*, dimana investor berhak mengikutsertakan tenaga kerja dari negaranya.

Untuk itu, Indra menghimbau agar pembentukan perda perlindungan naker ditunda dulu sementara menunggu hasil pembahasan DPR bersama Pemerintah dalam Rapat Gabungan itu. "Kalau bisa memantau perkembangan terkini, karena ini bukan hanya masalah TKA Ilegal yang masuk tetapi tentang kedaulatan bangsa. Kalaupun perda ingin mengatur lebih detail lagi, sepanjang tidak bertentangan dengan UU lain maka bisa dilakukan," tandasnya. ■

(am.pw.mp) / foto: asda / wa



Kapuslit DPR RI Indra Pahlevi bersama Anggota DPRD Tabalong

KUR Bersubsidi Disepakati Hingga 40 Persen

Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersubsidi akhirnya disepakati mencapai 40 persen yang menysasar para pelaku usaha di level terkecil. Sebelumnya, pemerintah baru menysasar 22 persen. Tahun 2017 ini sasaran sisanya akan ditambah 20 persen lagi.

Demikian dijelaskan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir usai memimpin rapat dengan Menkeu, Gubernur BI, dan Ketua OJK, Kamis (09/02). KUR dengan bunga bersubsidi itu, besarnya Rp25 juta tanpa agunan. KUR ini tak boleh salah sasaran. Pelaku bisnis besar sebaiknya tak diberikan KUR bersubsidi, karena kelompok ini dinilai sudah mampu, bahkan bisa mengambil kredit komersil dengan bunga tinggi.

"Ada beberapa penjelasan yang diberikan pemerintah soal target KUR bersubsidi. Di sektor pertanian, kehutanan, kelautan, dan perburuhan ternyata baru mencapai 22 persen. Kecil sekali. Tadi kita minta dikembangkan menjadi 40 persen. Pemerintah pun sepakat akan ditingkatkan 20 persen pada 2017 ini," ungkap Hafisz.

Politisi dari dapil Sumsel I ini,

mencontohkan, para tukang becak sangat layak menerima KUR bersubsidi. Kelompok ini tak memiliki aset. Bahkan, mungkin saja tak memiliki rumah tetap. "Seorang tukang becak perlu memperbarui becaknya. Itu, kan, perlu dana. Dia tidak punya aset. Rumahnya saja gubuk. Apa yang mau diagunkan, apalagi kalau rumahnya ngontrak. Nah, ini harus diberikan KUR yang Rp25 juta tanpa agunan," harapnya.

KUR bersubsidi juga layak diberikan bagi para pedagang kaki lima dengan satu meja lapak untuk berdagang. Perputaran uangnya hanya Rp500 ribu per

hari. Total KUR yang dikeluarkan pemerintah sendiri sebesar Rp100 triliun. Dengan program KUR ini, sambung Hafisz, pemerintah ingin membuka akses masyarakat untuk berusaha. Pada gilirannya, kemiskinan pun ikut dientaskan. Ada 28 juta rakyat yang sangat miskin dan 76 juta rakyat miskin. ■



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir



"Seorang tukang becak perlu memperbarui becaknya. Itu kan, perlu dana. Dia tidak punya aset. Rumahnya saja gubuk. Apa yang mau diagunkan, apalagi kalau rumahnya ngontrak. Nah, ini harus diberikan KUR yang Rp25 juta tanpa agunan"



Setjen DPR RI dan DPRD Tabalong Bahas Mekanisme Kerja Bamus

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI, Achmad Djuned menerima kunjungan beberapa Anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Dalam pertemuan di Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (09/02), dibahas mengenai mekanisme kerja Bamus, baik di DPR RI, maupun DPRD.

“Kegiatan DPR RI selalu menjadi rujukan dari DPRD. Jadi memang bahwa untuk DPRD peraturan tata tertibnya mengacu pada PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD. Namun dalam kegiatannya DPRD juga merujuk apa yang biasa dilakukan oleh DPR RI. Karena pada dasarnya, tugas dan fungsi hampir sama,” kata Djuned, di sela-sela pertemuan.

Djuned mengakui, ada sedikit perbedaan dalam keanggotaan Bamus di DPR RI maupun DPRD. Untuk DPR RI, keanggotaan Bamus merupakan unsur dari pimpinan fraksi. Sementara untuk DPRD, keanggotaan Bamus tidak harus pimpinan fraksi. Namun untuk Pimpinan Bamus DPRD, harus Pimpinan DPRD.

“Dengan mekanisme keanggotaan yang berbeda, kadang kebijakan yang sudah ditentukan oleh Bamus DPRD, perubahannya hanya bisa dilakukan oleh Pimpinan Fraksi.

Kalau di DPR RI, perubahan yang diambil oleh Bamus, harus dilaksanakan oleh Komisi atau rapat konsultasi Pimpinan Dewan pengganti Bamus,” jelas Djuned.

Djuned menambahkan, dalam setiap momentum Setjen DPR RI menerima kunjungan DPRD, pembahasannya selalu berbeda. Bahkan, permasalahan di DPRD pun berbeda-beda. Namun ada satu benang merah yang bisa ditarik antara DPR RI dan DPRD, karena secara fungsi sama.

“Ketika itu dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran maupun pengawasan. DPR RI dan DPRD juga memiliki fungsi yang sama,” imbuh Djuned.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Bamus DPRD Tabalong, Suryono mengatakan, tujuan kunjungan ini adalah untuk memperdalam tentang mekanisme dan tanggung jawab Bamus yang ada di DPRD maupun ingin mendapat gambaran

yang ada di DPR RI. Menurutnya, memang ada perbedaan antara Bamus DPR RI dan DPRD.

“Ada sistem yang bisa dipakai oleh DPRD, ada yang tidak bisa kita laksanakan Bamus DPRD. Kalau di DPR RI, beda jauh. Keanggotaannya dari pimpinan fraksi. Kalau DPRD itu dipilih. Yang penting jumlahnya separuh dari keanggotaan DPRD yang ada di Kabupaten Kota itu,” jelas Suryono.

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, saat ini DPRD Kabupaten Tabalong memiliki Anggota sebanyak 30 orang, dengan 3 Komisi. Untuk di Bamus, terdapat 15 Anggota, dengan komposisi 2 Pimpinan Bamus, dan Anggota 13 orang.

“Ada hal-hal baru yang kami dapat, dan akan kami bahas dan sampaikan kepada seluruh kelengkapan dewan,” tutup Anggota Komisi I DPRD Tabalong itu. ■

ifti foto: run/iod

Plt. Sekjen DPR RI Achmad Djuned menerima DPRD Tabalong

Komisi X DPR RI Selesaikan RUU Sisbuk Selama 8 Bulan

Rancangan Undang-undang Sistem Perbukuan (RUU Sisbuk) telah selesai dibahas di tingkat Panitia Kerja (Panja) Komisi X DPR RI. Pembahasan dimulai pada April 2016 lalu, dan hanya memakan waktu pembahasan selama delapan bulan. DPR RI dan Pemerintah, sepakat bahwa RUU ini merupakan payung hukum yang mendesak.

Demikian disampaikan Ketua Panja RUU Sisbuk sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra, usai memimpin rapat intern Panja RUU Sisbuk dengan Pemerintah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (09/02). Hadir diantaranya Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Totok Suprayitno, serta perwakilan beberapa kementerian lainnya.

"Ini hasil pembahasan yang sangat luar biasa, karena selama pembahasan muncul dinamika antara DPR RI dan Pemerintah. Tetapi karena niatannya untuk kepentingan rakyat, dan untuk kepentingan bagaimana meningkatkan minat baca, tentu tidak ada yang tidak bisa terselesaikan. Karena sudah dibungkus dengan cara yang baik. Perjalanan pembahasan hanya delapan bulan," tegas Sutan.

Politisi F-Gerindra itu memaparkan, semangat yang diusung oleh DPR RI maupun Pemerintah selama menyusun RUU Sisbuk ini adalah 3M. Yakni agar buku yang selama ini beredar menjadi Murah, Mutu, dan Merata. Khususnya, buku teks utama yang wajib dipakai dalam dunia pendidikan.

"Pemerintah nanti menyediakan buku, dengan tidak dipungut biaya kepada seluruh anak didik, yang selama ini sudah wajib belajar 12 tahun. Peralpnya, untuk untuk buku murah dan terjangkau, selama ini belum ada payung hukumnya. Dengan adanya UU ini, ada landasan hukumnya. Dengan payung hukum inilah yang membuat tugas Pemerintah dan DPR RI bisa mendatangkan anggaran untuk perbukuan," jelas Sutan.

Sementara terkait mutu, masih kata Sutan, dengan adanya UU ini akan diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah, sehingga diharapkan tidak ada lagi buku-buku yang tidak bermutu. Selain itu, dengan diaturnya peredaran buku dalam RUU ini, buku dapat didistribusikan ke seluruh pelosok Tanah Air.

Sutan menambahkan, untuk menjamin agar 3M ini berjalan di tengah masyarakat, semula RUU ini mengamanatkan untuk dibentuk sebuah Dewan. Namun, dalam perjalanannya, dan hasil konsultasi antara DPR RI dan Pemerintah, diputuskan untuk lembaga pelaksanaanya cukup di Eselon I Kemendikbud. Dalam hal ini, lembaga perbukuan yang dimaksud akan ditambahkan dalam Tupoksi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud.

"Badan ini juga sudah dibuat oleh negara tetangga kita, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Tentu ini menjadi langkah cerdas, karena Badan Bahasa juga sampai ada di daerah-daerah. Dengan demikian ini satu kesatuan yang nantinya implementasinya di lapangan," jelas Sutan.

Sutan menjelaskan, tahapan berikutnya adalah uji publik RUU Sisbuk pada 20-22 Februari mendatang. Kemudian, akan dibahas pada rapat kerja dengan Kemendikbud pada 23 Februari, dan berikutnya akan disampaikan ke Badan Musyawarah. Jika disetujui Bamus, maka RUU akan disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI, pada 24 Februari, sekaligus penutupan masa persidangan.

"Saya memberi apresiasi terhadap Pemerintah yang telah melakukan kompak



Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra

dalam pembahasan. Kami berharap, masyarakat mengetahui negara hadir dalam hal perbukuan, dan inilah kerja DPR RI dan Pemerintah," imbuh politisi asal dapil Jambi itu.

Sementara itu, Kepala Balitbang Kemendikbud, Totok Suprayitno mengatakan, proses pembahasan selama delapan bulan termasuk dinamika yang cepat dan lancar. Ia mengapresiasi kinerja Pimpinan dan Anggota Panja RUU Sisbuk yang luar biasa dan efektif selama pembahasan.

"Pada dasarnya dari Pemerintah selalu konsolidasi, dan dalam konsolidasi ada hal-hal yang perbedaan pandangan, perbedaan itu bisa diselesaikan di internal Pemerintah, dan kemudian bisa disepakati di Panja," jelas Totok. ■



BPJS Kesehatan Diminta Inovatif Tingkatkan Kepesertaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus melakukan langkah inovatif untuk meningkatkan kepesertaan, dalam upaya mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) tahun 2019. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendy saat membacakan salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPJS Kesehatan dan Dewan Pengawas Kesehatan.

“ Sosialisasi kepada peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) serta Bukan Pekerja (BP) perlu ditingkatkan. Kita juga minta dibuat simulasi perhitungan untung-rugi integrasi Jamkesda ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk disosialisasikan kepada pemerintah daerah,” tegas Dede di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (09/02).

Dede mengatakan, dalam rangka menyediakan fasilitas yang cukup bagi peserta JKN secara kuantitas maupun kualitas, pihaknya meminta BPJS Kesehatan untuk melakukan *kredensial* dan *rekredensial* dengan mengedepankan objektivitas dan transparansi.

Masih kata Dede, Komisi IX DPR RI juga mendesak BPJS Kesehatan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi para pemangku kepentingan, terkait perubahan sistem pembayaran bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) menjadi sistem pembayaran Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBKP).

"Melalui sosialisasi dan pelatihan kepada pemangku terutama Dinas Kesehatan dan petugas kesehatan di FKTP, serta menyediakan ruang konsultasi dan pendampingan bagi Dinas Kesehatan dan FKTP," kata politisi Partai Demokrat itu.

Komisi IX DPR RI juga meminta BPJS Kesehatan untuk melakukan kajian terkait regulasi *one virtual account*

dalam 1 Kartu Keluarga, yang terdapat dalam Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penagihan dan Pembayaran luran Jaminan Kesehatan Nasional. Pasalnya peraturan ini masih menimbulkan banyak masalah di masyarakat.

BPJS Kesehatan juga diminta mengimplementasikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. Terkait kriteria pemberian kompensasi kepada peserta BPJS Kesehatan yang di daerahnya tidak ada fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna kebutuhan medis.

Komisi IX DPR RI juga mendesak BPJS Kesehatan untuk memprioritaskan peningkatan kompetensi verifikator di Fasilitas Kesehatan Rawat Tingkat Lanjut (FKRTL) agar mekanisme pengajuan dan pembayaran klaim tidak mengalami permasalahan seperti keterlambatan pembayaran fraud dan mispersepsi terhadap coding INA CBGs.

BPJS Kesehatan diminta berperan aktif memberikan laporan secara berkala kepada komisi IX DPR RI atas hasil pengawasannya terhadap kinerja BPJS Kesehatan. ■



Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf

"Sosialisasi kepada peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) serta Bukan Pekerja (BP) perlu ditingkatkan. Kita juga minta dibuat simulasi perhitungan untung-rugi integrasi Jamkesda ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk disosialisasikan kepada pemerintah daerah"

Anggaran BKPM Terlalu Minim

Komisi VI DPR RI menilai, anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terlalu minim untuk mendatangkan banyak investor ke dalam negeri. Target tinggi yang dibebankan kepada BKPM tak didukung anggaran yang cukup.

Demikian mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala BKPM Thomas Lembong, Senin (13/2), yang membahas anggaran untuk APBN-P 2017. Anggota Komisi VI DPR RI Iskandar Syaichu yang juga Anggota Banggar DPR RI, menegaskan, "BKPM adalah ujung tombak pemerintah dalam menjaring investasi. Sejak saya menjadi Anggota DPR RI, anggaran BKP tidak pernah signifikan."

Ditambahkan Anggota F-PPP itu, untuk menjaring investor masuk ke Indonesia butuh biaya besar. Padahal, target pada tahun 2017, BKPM harus mengejar Rp678 triliun. Bahkan, pada

2018 target tersebut dinaikkan lagi mencapai Rp800-Rp900 triliun. Disampaikan Iskandar, masih ada ruang bagi BKPM bila ingin menaikkan anggarannya pada APBN-P 2017.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana tersebut, Thomas menyampaikan, anggaran BKPM 2016 yang semula Rp520.901.324.000 mengalami perubahan menjadi

Rp488.465.562.000. Pemotongan ini dilakukan, karena ada seruan penghematan dari Menteri Keuangan. ■

fmh/fotografiak



BKPM
BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL

"BKPM adalah ujung tombak pemerintah dalam menjaring investasi. Sejak saya menjadi Anggota DPR RI, anggaran BKP tidak pernah signifikan"



Anggota Komisi VI DPR RI, Iskandar Syaichu



RUU Wasantara Diharapkan Jadi RUU Induk

Rancangan Undang Undang Wawasan Nusantara (RUU Wasantara) diharapkan menjadi payung berbagai Undang-undang induk yang menyangkut kebudayaan, kebangsaan, nasionalisme dan kenusantaraan. Namun hal ini harus dipikirkan secara hati-hati.



Penyerahan cinderamata usai pertemuan Pansus RUU Wasantara dengan Tokoh Masyarakat Bali

Demikian mengemuka saat Tim Kunker Panitia Khusus (Pansus) RUU Wasantara menyerap aspirasi berbagai tokoh Bali di Kantor Gubernur Provinsi Bali, Senin (13/02).

Dalam kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Pansus RUU Wasantara Khatibul Umam Wiranu itu, tim kunker menerima berbagai aspirasi dan dukungan dari berbagai pihak, antara lain tokoh dari Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat

Adat Setempat, Akademisi dan Pemprov Bali.

"Usulan bahwa RUU Wasantara ini harus terwujud dan menjadi UU induk merupakan dukungan masyarakat yang perlu kita pikirkan secara hati-hati. Karena menurut tata cara pembuatan UU, apakah memungkinkan kita memproduksi UU yang disebut UU induk," kata Khatibul menanggapi usulan dari Ketua Umum FKUB Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet.

Politisi F-PD itu tak menampik, dari

jumlah 1500 UU yang saat ini berlaku, masih ada UU yang tumpang tindih, bahkan overlap. "Hal inilah yang memang memerlukan payung yang lebih tinggi. Tinggal kita pelajari bagaimana teknis pembuatannya," imbuh Khatibul.

Lebih lanjut Khatibul menekankan bahwa pembahasan UU ini memerlukan kehati-hatian dalam pembuatannya, karena menyangkut berbagai jenis perlindungan dan definisi budaya adat istiadat seluruh Indonesia. Menurutnya, definisi dalam RUU tidak boleh terlalu sederhana, sehingga menimbulkan masalah di adat-adat tertentu karena RUU ini membahas tentang puncak-puncak kebudayaan daerah juga.

"Nah makanya, kita harus lebih mempunyai kemampuan untuk menyerap melalui kunjungan seperti ini maupun kita memanggil tokoh-tokoh ke Jakarta," imbuh politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Dalam pertemuan ini juga ditekankan upaya mengembalikan marwah dan nilai-nilai luhur yang saat ini banyak dilupakan, sehingga pembahasan RUU ini nantinya akan dijadikan sebuah pondasi dalam keseluruhan pengorganisasian, perundangan, maupun dari segi kebijakan. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI yang bersifat dinamis dan berkelanjutan. ■

(rely) foto: raska



DPR RI Desak Segera Bentuk Badan Urusan Haji

DPR RI mendesak pemerintah agar segera membentuk Badan Negara Non Kementerian yang menangani urusan Ibadah Haji. Lembaga tersebut diyakini mampu menyelesaikan berbagai bentuk persoalan penyelenggaraan Ibadah Haji yang terjadi selama ini, termasuk masalah kuota. Termasuk menangani lemahnya bargaining positioning pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Saudi Arabia.

Demikian mengemuka dalam diskusi Forum Legislasi UU Haji dan Umroh dengan tema 'Mungkinkah Penambahan Kuota Haji Akan Merata?'. Hadir sebagai pembicara Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mujahid, Ketua Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Deding Ishak, dan Pengamat Haji Subarkah. Forum ini dimoderatori oleh Wartawan Warta Ekonomi, Ferry Kurniawan.

"Indonesia sebagai negara yang jumlah jamaah hajinya terbesar di dunia, tapi bargaining positioning-nya masih lemah. Karena itu DPR RI mengusulkan dibentuk Badan Khusus Penyelenggara Ibadah Haji. Badan ini bukan swasta, bukan pemerintah, tapi badan non kementerian yang berada di bawah Presiden RI. Badan inilah yang akan

mengurus penyelenggaraan ibadah haji secara khusus," kata Sodik.

Politisi F-Gerindra itu menambahkan, dalam badan baru tersebut harus ditempatkan orang-orang yang benar-benar memiliki kapasitas dalam mengurus seluruh rangkaian Ibadah Haji. Sementara Kementerian Agama tidak pas dalam pekerjaan yang sebagian besar aktifitasnya terkait perjalanan.

Sodik mengingatkan, penambahan kuota haji harus diperjuangkan dengan membahasnya dengan Kerajaan Arab Saudi. Menurutnya, saat ini berkurangnya kuota internasional yang berdampak kepada kuota di setiap negara, juga ada juga permasalahan pada kuota provinsi dan kabupaten atau kota di Indonesia. Selama ini pembagian kuota dikendalikan kepada Gubernur.

"Sampai saat ini kuota kota dan

kabupaten itu jatahnya di bawah kendali Gubernur dan itu yang sering ada masalah di tiap kota dan kabupaten. Setiap kota dan kabupaten tidak tahu persis berapa kuota jamaahnya, karena kendali kuota itu adanya di provinsi," jelas Sodik.

Sodik menambahkan, Saudi Arabia dan Indonesia itu memiliki kultur keagamaan yang sama, maka semaksimal mungkin lobi haji itu bisa berhasil dengan memperkuat diplomasi tersebut agar kuota haji bisa terus bertambah, atau bisa mengoptimalkan sisa kuota haji dari negara lain.

"Jumlah jamaah haji yang besar ini seharusnya menjadi kekuatan besar agar penyelenggaraan haji makin baik. Seperti halnya yang dilakukan Iran dan Turki," imbuh politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR RI Deding Ishak menyarankan pemerintah untuk bisa mengoptimalkan kuota haji negara-negara tetangga, yang tidak digunakan.

"Kuota negara tetangga yang tidak digunakan bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Disamping adanya pembatasan ibadah haji bagi mereka yang sudah menunaikan ibadah haji, maka diberi tenggang waktu sampai 10 tahun baru bisa berhaji lagi," jelas Deding.

Selain itu, tambah politisi F-PG itu, upaya perbaikan penyelenggaraan ibadah haji harus terus ditingkatkan terkait pemondokan, konsumsi, catering, transportasi dan sebagainya.

"Kini sudah baik. Tapi, tetap harus meningkatkan pelayanan haji tersebut demi kenyamanan, khususnya an jamaah haji dalam beribadah," imbuh politisi asal dapil Jawa Barat itu. ■

fot: sidi foto: runi



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Deding Ishak dan Sodik Mudjahid



Ceu Popong Dapat Penghargaan MURI

Anggota Komisi X DPR RI Dr. (HC) Popong Otje Djundjungan yang akrab dipanggil Ceu Popong mendapat rekor MURI dengan kategori "Anggota DPR dengan Penghargaan terbanyak".

Ketua MURI Jaya Suprana mengatakan, biasanya orang yang mendapat rekor MURI merasa terhormat, tapi kali ini MURI yang merasa mendapat penghormatan karena bisa menganugerahkan penghargaan kepada Ceu Popong. Anggota F-PG itu menjadi tokoh suri teladan bagi bangsa Indonesia ini.

"Wakil rakyat ini benar-benar berperan sebagai wakil rakyat bukannya wakil partai politik atau wakil pemerintah, dan beliau sudah mendapatkan penghargaan terbanyak dengan jumlah 506 piagam dari berbagai jenis," kata Jaya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (10/02).

Lebih lanjut Jaya mengatakan, rekor ini tidak layak diakui sebagai Rekor Indonesia, tetapi Rekor Dunia. Di Amerika Serikat pun tidak ada anggota parlemen yang telah berhasil memperoleh 506 penghargaan.

"Tolong Anda rawat jiwa raga dengan sebaik mungkin, supaya 21 tahun kemudian kita akan berjumpa dengan memberikan penghargaan kepada Anggota DPR RI yang telah mengabdikan sampai usia 100 tahun,"ujarnya.

Usai menerima penghargaan rekor MURI itu, Ceu Popong mengutarakan terimakasih kepada orang-orang yang telah memberikan penghargaan, sehingga hari ini dirinya bisa berdiri disamping Jaya Suprana.

Dalam kesempatan ini, politisi F-PG itu menyampaikan kata mutiara yang selama ini menjadi pegangan hidupnya yaitu 'Jangan pernah mengingiat apa yang telah diberi tetapi pikirkan apa yang akan di berikan besok'.

Ceu Popong juga menghimbau kepada anak muda untuk memanfaatkan waktu yang dimiliki dengan sebaik mungkin dan penuh tanggungjawab sesuai dengan peran masing-masing.

"Yang muda yang berkaya, yang tua juga tetap berkaya. Setiap orang ada waktu setiap waktu ada orangnya, waktu sekarang adalah untuk kita yang sekarang hidup apakah itu anak muda atau yang sudah ada usia. Yang penting adalah bagaimana kita mengisi waktu yang diberikan karena waktu tidak akan pernah kembali," imbuhnya.

Perlu diketahui Ceu Popong merupakan anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan dan kebudayaan. Ia terpilih

menjadi wakil rakyat selama 5 Periode di Dapil I Jawa Barat.

Hadir dalam acara ini pula Pimpinan DPR Fadli Zon dan Agus Hermanto, tokoh Partai Golkar seperti Aburizal Bakrie dan Tantowi Yahya, Menteri KKP Susi Pudjiastuti serta sederet keluarga, kolega dan grup musik Bimbo dan Himpunan Organisasi yang dipimpin oleh Ceu Popong. ■

(fmm.pw.mpi/fotoandika)



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon Ceu Popong dan Jaya Suprana

PENGANUGERAHAN REKOR MURI KATEGORI : ANGGOTA DPR DENGAN PENGHARGAAN TERBANYAK

JAKARTA, 10 FEBRUARI 2017





Ketua DPR RI dialog dengan warga sesuai pencoblosan
Rabu, (15/02) Foto: andi/hr

Wakil Ketua DPR RI bidang
Korpolkam Fadli Zon menerima
OC Mukhtar XXX Pelajar
Islam Indonesia
Selasa, (14/02), Foto : Arief/hr



Pimpinan Komisi II DPR RI
meninjau langsung Pilkada di
Tangsel dan Jakarta.
Rabu, (15/02),
Foto: iwan-jayadi/hr